

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Terciptanya sistem pemerintahan elektronik terpadu (*E-Government*) tidak terlepas dari salah satu program Pemerintah Daerah untuk mempercepat reformasi birokrasi, tujuan dari konsep *E-Government* adalah untuk meningkatkan standar tata kelola global. terkait erat dengan konsep *E-Government* Implementasi *Smart City* adalah salah satu contoh penerapan *E-Government* Kota cerdas seharusnya memiliki opsi untuk berubah menjadi penghubung antara pemerintahan daerah setempat dalam mendapatkan administrasi yang layak dan mahir dari pemerintah daerah, dengan menggunakan TIK (Inovasi Data dan Korespondensi) ada beragam definisi *Smart City* di luar sana (Rahmadanita dkk., 2018)

Proyek *Smart City* telah banyak dibahas di Amerika Serikat; namun, dalam kasus negara berkembang, proyek *Smart City* akan berfokus pada cara-cara di mana para pembuat keputusan di negara berkembang dan negara berkembang dapat memperoleh manfaat. Sebagai bagian dari perencanaan dan implementasi *Smart City* di kota masing-masing, kota-kota ini Barcelona, Amsterdam, Tokyo, Mumbai, Seoul, Melbourne, Shanghai, Dubai, Singapura dan lain-lain akan memiliki cita rasa uniknya masing-masing. Hasilnya, akan memungkinkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan *Smart City* dari kota lain dalam hal menganalisis data. Kota Bogor sebagai kota hinterland atau kota penyangga Ibu Kota Negara sedang mengalami fase yang sama dengan kota-kota lain di dunia. Untuk mengatasi masalah perkembangan, ia muncul tanpa henti, silih berganti, mengambil, dan

berubah bentuk zaman. Penerapan *Smart City* di beberapa Kota di Indonesia ternyata memiliki berbagai kelemahan dan kelebihan. Hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengingat kota-kota besar di Indonesia tentunya memiliki banyak kesamaan, namun ternyata penerapan konsep *Smart City* di setiap Kota besar tersebut memiliki latar belakang yang berbeda (Utomo & Hariadi, 2017).

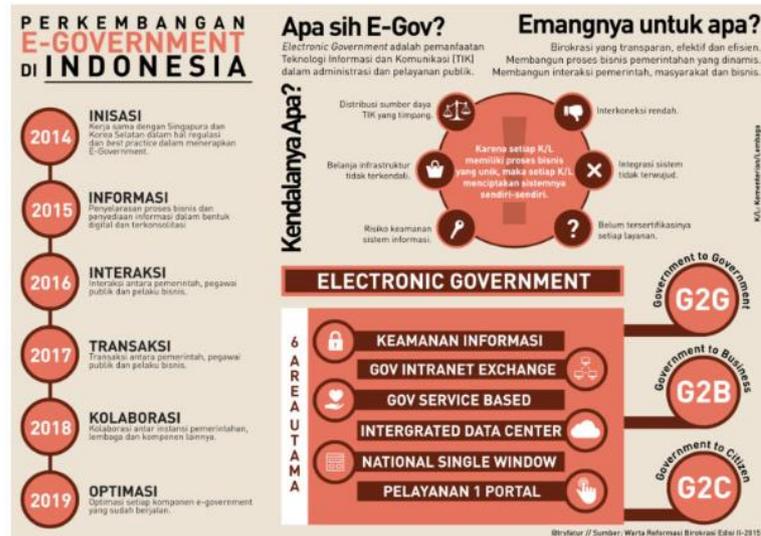
Ada beragam definisi *Smart City* di luar sana yaitu *Smart Government*, *Smart Economy*, *Smart live*, *Smart Living*, *Smart People* dan *Smart mobility* (Rahmadanita dkk., 2018) Jika dibandingkan dengan cara manual atau konvensional, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga sangat menguntungkan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin cepatnya masyarakat mendapatkan informasi berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Mekanisme birokrasi pemerintahan jenis baru dikenal dengan *Electronic Government (E-Government)* muncul sebagai akibat dari beberapa negara maju yang mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi digital terkini.(N. Widodo, 2016). Menurut *The World Bank Group* (De Kleine dkk., 2002). *Government* merupakan upaya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk menjadikan pelayanan pemerintahan menjadi lebih baik dan efektif, transparan, dan akuntabel.

Pendekatan alternatif untuk masalah perkotaan ini adalah pembangunan kota pintar, yang akan menjamin kondisi layak huni dalam menghadapi ledakan populasi di seluruh dunia. Pemahaman menyeluruh tentang konsep Kota Cerdas juga diperlukan untuk membangun kota pintar. Untuk mencapainya *good government* dan *good governance* baik di perkotaan maupun di pedesaan, sangat dinanti-nanti suatu bangsa akan menerapkan *E-Government*, khususnya di negara

berkembang.(Arjita, 2017). Penyelenggaraan *E-Government* bertujuan untuk meningkatkan kinerja internal pemerintah, namun tujuan akhirnya adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup manusia (Indrajit, 2005). Terciptanya sistem pemerintahan elektronik terpadu (*E-Government*) tidak terlepas dari salah satu program pemerintah daerah untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Konsep *E-Government* hadir dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di dunia. (Rahmadanita dkk., 2018). Tujuan awal dari konsep *Smart City* adalah untuk meningkatkan kualitas kota dan menjadikannya "pintar" dengan meningkatkan infrastruktur teknologinya, khususnya ICT (*Information Communication and Technology*) dalam batas-batasnya (Arafah & Winarso, 2020). Pemerintah Indonesia saat ini sudah mulai mempublikasikan informasi melalui *E-Government*

**Gambar 1. 1 Perkembangan E-Government**



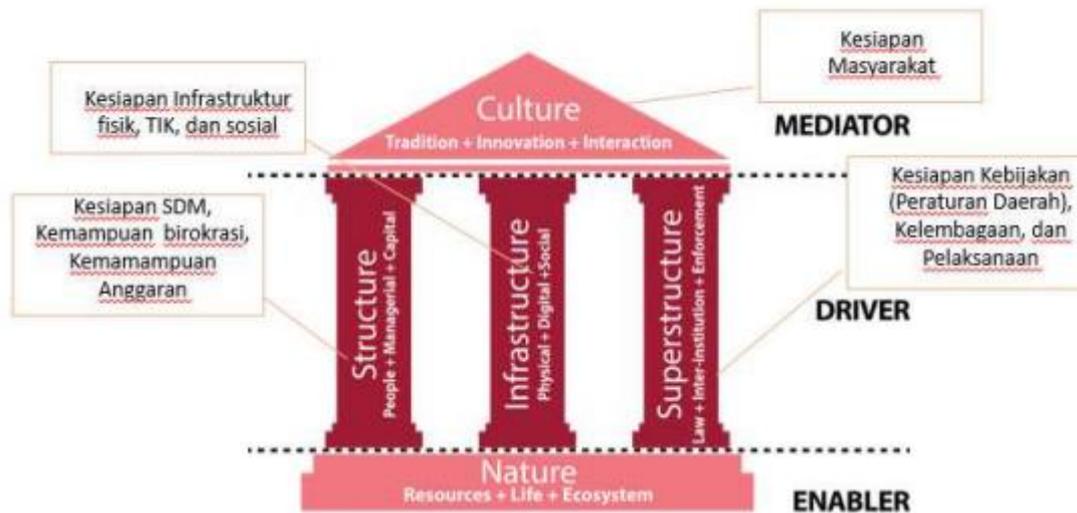
**Sumber: (Idtesis.Com 2018)**

Setidaknya faktor yang harus diperhatikan untuk menjamin terlaksananya rencana pengembangan *E-Government* dan mewujudkan *E-Government*: pertama, publikasikan dan manfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) agar data pemerintah lebih mudah diakses. Kedua, tidak hanya itu ada pula sistem perijinan, pengadaan dan bahkan sistem pengaduan yang berbasis online dan sistem lainnya. Ketiga, kehidupan yang lebih layak dan juga penagan masalah kadang terjadi di perkotaan seperti sampah yang sulit dikelola, polusi udara, permasalahan dalam kesehatan, lalu lintas yang makin macet dan jalan yang tidak memadai, serta masalah sosial dan juga ekonomi (Gustomy, 2018). Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 29 Tahun 2014. Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Kota Bogor (TP4) dibentuk dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian isu-isu strategis dan

mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Selain itu, dibuat dokumen Rencana Induk Pembangunan *E-Government* Pemerintah Kota Bogor Tahun 2014-2018 untuk memberikan arah yang jelas bagi perencanaan dan pengembangan *E-Government* berbasis TIK (Informasi Dan Teknologi Komunikasi).

Kebutuhan daerah untuk merespon perkembangan globalisasi yang terus berkembang dengan laju yang semakin cepat membentuk berbagai isu yang sebelumnya tidak ada namun menjadi isu hangat yang menarik perhatian seluruh dunia menjadi pendorong dibaliknya penerapsn *Smart City* di berbagai daerah. Ketika pemerintah diminta untuk menjadi pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan di wilayahnya, membangun *Smart City* tidaklah mudah, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk memahami konsep *Smart City* secara mendalam (Manurung dkk., 2020) *Smart City* adalah konsep perencanaan kota dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. *Smart City* juga kota yang secara antisipatif mampu mengelola sumber daya secara inovatif dan berdaya saing, dengan dukungan teknologi dalam rangka mewujudkan Kota yang nyaman dan berkelanjutan (*Definisi-Smart-City,t.t.*) di akses pada sabtu, 15 Oktober 2022.

**Gambar 1. 2 Membangun Kesiapan Menjadi *Smart City***



**Sumber: (slideplayer 2017)**

Sementara pada kota-kota modern di berbagai belahan dunia, konsep Kota pintar telah berorientasi pada kemajuan teknologi pelayanan yang bertujuan mempermudah kehidupan masyarakatnya. Mulai dari urusan transportasi, perniagaan atau perdagangan, hingga urusan memesan makanan dapat dengan mudah dilakukan setiap individu yang bermukim dalam wilayah *Smart City*. Selain itu, *Smart City* juga dalam rangka memberikan jaminan keamanan, di mana kejahatan atau kriminalitas dapat dicegah secara dini sehingga hak setiap individu terlindungi dengan baik (Hamluddin, 2021)

Perkembangan kota-kota saat ini semakin dinamis dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Aktivitas ekonomi dan sosial penduduk Kota perlahan memberikan dampak terhadap lingkungan Kota sehingga terjadi penurunan kualitas hidup di Kota. Di samping itu, perkembangan Kota saat ini pun cenderung mengarah kepada Kota yang cerdas dimana mampu memberikan pelayanan publik, pemanfaatan sumberdaya, serta penyebaran informasi, dengan nyaman dan cepat dengan

memanfaatkan berbagai teknologi. Konsep pembangunan dan pengelolaan Kota yang mutakhir dengan pemanfaatan teknologi sebagai core-nya. salah satunya *Smart City* (Ikhwan & Sutriadi, 2018).

Pada hakekatnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan dalam berbagai bidang; bahkan terlihat jelas bahwa pelayanan dan manusia tidak dapat dipisahkan. (Sinambela, 2006). Proses penyediaan pelayanan publik menyangkut pemenuhan kebutuhan baik pemberi maupun penerima pelayanan dengan cara yang saling menguntungkan. Pelayanan publik pada hakekatnya merupakan rangkaian kegiatan rutin. Menurut UU No. 25 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pelayanan publik sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau jasa administrasi yang disediakan oleh penyelenggara.”

Tujuan dari Dokumen Rencana Induk *E-Government* Kota Bogor adalah untuk memberikan seperangkat kriteria yang lebih realistis untuk memilih salah satu kegiatan Kota Bogor yang menggunakan teknologi informasi. Selain itu, Rencana Induk *Government* Kota Bogor yang disebutkan di atas akan memberikan *E-Government* Pemerintah Kota Bogor yang komprehensif, efisien, efektif, dan berlandaskan *Good Corporate Governance* dan tetap berada dalam kerangka dan bagian dari TIK (Informasi Dan Teknologi Komunikasi) di lingkungan Bogor. Pemerintah sendiri memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik kepada seluruh warga negara, sehingga dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pemerintah berusaha memperbaiki pelayanannya dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi yang mampu mengolah data dengan cepat, efektif dan efisien untuk menghasilkan informasi yang tepat dan akurat (Rahmadanita dkk., 2018)

Kota Bogor sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi dan jasa yang strategis, sehingga menimbulkan daya tarik masyarakat untuk migrasi ke dalam atau terjadi urbanisasi. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat seperti pada tahun 2022 sebanyak 1.114.018 orang atau meningkat sekitar 2,07% (Data Percepatan Penduduk Kota Bogor 2022).

Majalah Warta Ekonomi memberikan penghargaan *E-Government* sebagai juara terbaik dalam kategori Kabupaten/Kota Pelaksana *E-Government*, bersama Kota Surabaya dan Kabupaten Jember. Pada tahun yang sama, Universitas Gunadarma mempersembahkan Kota Bogor sebagai juara kedua untuk Website Tingkat II Terbaik Indonesia (Junaidi, 2011). Penghargaan ICT (*Information Communication and Technology*) diberikan kepada Bogor tahun 2011. Kota Bogor mendapat predikat tingkat menengah nasional dan dinobatkan sebagai salah satu dari lima kota terbaik di Provinsi Jawa Barat, seperti yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika tingkat nasional. Kota ini diperkirakan siap menghadapi ekonomi digital. Selain itu, Kota Bogor meraih penghargaan IDSA (*Indonesia Digital Society Award*) 2013 sebagai Juara Harapan I kategori Pemkot dan sebagai Juara Perak kategori Masyarakat. Penghargaan 2014. Hasilnya, penelitian yang dilakukan di Kota Bogor ini dapat menjadi percontohan bagi instansi pemerintah lain yang menerapkan *E-Government*.

Berbagai keanehan di atas terkait dengan perkembangan *E-Government* di Kota Bogor, salah satunya harus dilihat bahwa sampai saat ini Kota Bogor telah berhasil mencapai prestasi di bidang kemajuan informasi dan persuratan (TIK). Bogor dinobatkan sebagai salah satu dari lima kota terbaik di Provinsi Jawa Barat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tingkat nasional dan mendapat predikat tingkat nasional menengah, kota ini dianggap siap menghadapi era ekonomi digital. Penting untuk dicatat bahwa pertumbuhan *E-Government* di Kota Bogor, khususnya pada tahun 2008 dan 2009, memicu sejumlah bentuk pembangunan baru yang ditujukan untuk mewujudkan *Smart City*, termasuk layanan kependudukan.

Sebagai pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, meniadakan pemborosan, dan menyediakan lingkungan yang berkualitas bagi setiap individu masyarakat, maka termasuk dalam kategori ini. Pemerintah Kota Bogor bekerja keras untuk memastikan bahwa perlindungan zaman tetap terjaga. Dan dipertahankan pengembangan Kota Cerdas yang menekankan pada inovasi, desain, dan penggunaan terbaik teknologi dari sumber daya manusia dan teknologi mengakibatkan kurangnya kemajuan. Digitalisasi dan komputasi telah ada sejak 2004 dan terus berkembang sejak 2012. Namun demikian, terjadi peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang signifikan pada sektor publik dan swasta di Kota Bogor pada tahun 2015, dengan fokus pada materi *E-Government*.

Dalam penerapan *Smart City*, Kota Bogor meluncurkan sebuah aplikasi pelayanan dan aduan untuk masyarakatnya yaitu SiBadra. Aplikasi SiBadra adalah

aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bogor untuk melayani berbagai aduan dan saran dari masyarakat Kota Bogor. SiBadra adalah kependekan dari Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran. Adapun fungsi dari SiBadra yaitu untuk memberikan pengaduan berupa permasalahan yang terjadi di Kota Bogor dan memberikan saran kepada Pemerintah Kota Bogor. Aplikasi SiBadra ini dapat kita unduh di *Google Play Store* atau *AppStore*. Dengan hal ini, Pemerintah Kota Bogor telah berupaya untuk dapat memberi pelayanan berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat melalui penerapan *E-Government*. Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (selanjutnya disingkat SiBadra) merupakan salah satu inovasi kebijakan platform digital yang berupaya meningkatkan efisiensi laporan aduan dan saran dari masyarakat kepada pemerintah.

Aplikasi ini resmi diluncurkan pada April tahun 2019, setahun setelah diuji coba oleh Diskominfo Kota Bogor. Smart governance itu sendiri selain sekedar menerapkan teknologi terbaru dalam pelayanan publik, juga merupakan upaya perwujudan proses demokrasi yang lebih baik dan mengubah bagaimana pelayanan publik itu sendiri diberikan (Kozáková, 2013). Apabila melihat dari perspektif ini, maka aplikasi SiBadra dapat juga dipandang sebagai suatu upaya perwujudan proses demokrasi. SiBadra dapat dikatakan seperti itu karena adanya perbedaan aplikasi SiBadra dengan aplikasi pelaporan aduan dan saran lainnya, yakni disediakannya kolom komentar pada setiap laporan. Kolom komentar ini memperbolehkan interaksi antara OPD dengan masyarakat maupun masyarakat dengan masyarakat dalam menjawab ataupun membahas permasalahan sesuai laporan yang dikomentari. Sebuah public sphere dimana seluruh lapisan masyarakat

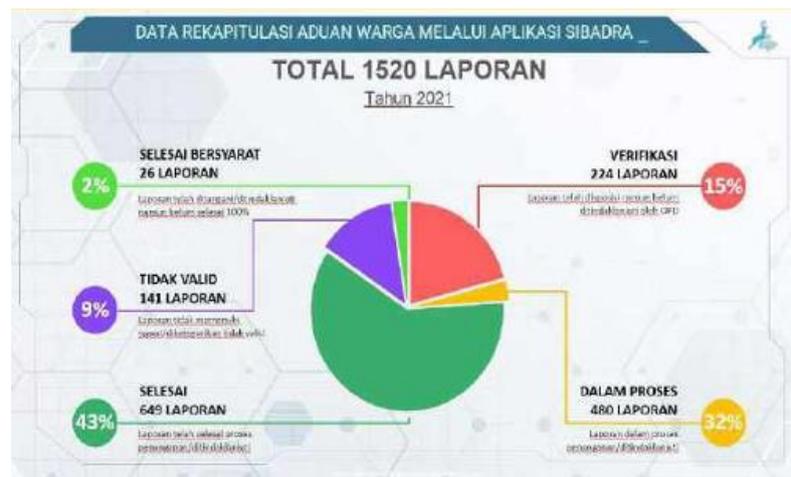
bermodalkan gawai dan internet bisa ikut serta berpartisipasi dalam permasalahan kota,

SiBadra menciptakan potensi dorongan proses demokrasi pada aplikasi tersebut. Menurut Henman 2010 dalam (Cropf, 2016), menyebutkan upaya pemerintah untuk mendorong, memfasilitasi, dan memberdayakan warga negara biasa untuk mengambil peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan terlibat satu sama lain dalam ruang publik virtual merupakan salah satu konsep *E-Government* yang mendorong proses demokrasi di masyarakat, sama seperti yang ada di aplikasi SiBadra.

Dalam data pada aplikasi pengaduan masyarakat sepanjang Tahun 2021, dapat terlihat bahwa laporan pengaduan masyarakat Kota Bogor total sebanyak 1520 laporan, dari total penginstal di bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sebanyak 10379 orang pengguna baru. Pengembangan pengelolaan pengaduan masyarakat ini yaitu dengan adanya Survei Kepuasan Masyarakat pada aplikasi lokal pemerintah Kota Bogor yang kedepannya dapat mengukur sejauh mana penggunaan aplikasi pengaduan masyarakat dapat membantu mengkomunikasikan permasalahan dengan berbagi aduan dan saran serta sebagai media komunikasi

diantara masyarakat dan Pemerintah Kota Bogor. Rincian rekapan pengaduan adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. 3 Data Rekapulasi Aduan Warga Melalui Aplikasi SiBadra**



**Sumber: (laporan keterbukaan informasi publik 2021)**

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa daerah yang berinisiatif dan berhasil menerapkan *E-Government*. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, terutama pada saat implementasi *E-Government*, akan dibahas dalam kajian ini. Istilah " Critical Success Factors" mengacu pada faktor-faktor yang berpengaruh atau menentukan kesuksesan (Henny, 2006). Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjadi subjek kajian ini karena Pemerintah Kota Bogor dianggap sebagai salah satu daerah yang berhasil menerapkan *E-Government*. *E-Government* diuji cobakan di Kota Bogor antara tahun 2008 dan 2009, tidak lama setelah Inpres diluncurkan, dan berhasil dilaksanakan pada tahun 2009 oleh berbagai pemangku kepentingan (Napitupulu, 2015).

Melihat keanehan-keanehan yang tergambar, maka peneliti berkeinginan untuk mengarahkan kajian lebih lanjut tentang bagaimana membina *E-Government* dalam mewujudkan Kota Cerdas di Kota Bogor, *E-Government* digunakan sebagai

pedoman bagi Pemerintah Kota Bogor dan pihak lainnya dalam mengembangkan *E-Government* untuk penerapan *Smart City* ke depan. Dan aplikasi pelayanan satu pintu atau biasa disebut dengan SiBadra ini dijadikan sebagai alat bantu atau pelayanan online yang sedang dilakukan oleh Pemkot Kota Bogor untuk memberikan pelayanan yang efisien dan efektif.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi *E-Government* dalam mewujudkan *Smart City* diKota Bogor melalui aplikasi SiBadra?
2. Bagaimana strategi pemerintah dalam mensosialisasikan program *Smart City* melalui aplikasi SiBadra diKota Bogor?
3. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai *Smart City* melalui aplikasi SiBadra diKota Bogor?

### 1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis implementasi *E-Government* dalam mewujudkan *Smart City* diKota Bogor melalui aplikasi SiBadra
2. Menganalisis strategi pemerintah dalam mensosialisasikan program *Smart City* melalui aplikasi SiBadra diKota Bogor
3. Menganalisis persepsi masyarakat mengenai *Smart City* melalui aplikasi SiBadra diKota Bogor

## 1.4. Signifikansi Penelitian

### 1.4.1 Signifikansi Akademik

Peneliti menggunakan 10 (sepuluh) referensi jurnal dari berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *E-Government* dan *Smart City* pada pengembangan *Smart City* yang melibatkan partisipasi public dalam pengimplementasiannya. Namun peneliti tidak menemukan penelitian terkait *E-Government* dalam implementasi *Smart City* di Kota Bogor melalui aplikasi SiBadra.

Penelitian pertama ditulis oleh Arjita Utama Andri tahun 2017 yang berjudul *Government Sebagai Bagian Dalam Smart City*. Pemerintah juga membangun *Smart City* dengan menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan. Pemerintahan yang baik diharapkan dapat berkembang sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Pemerintah Indonesia telah memiliki rencana kebijakan penerapan *E-Government* di seluruh instansi pemerintah untuk mengefektifkan pemerintahan administrasi. Konsep *Smart City* menyediakan sarana untuk mempercepat dan meningkatkan kebijakan pemerintah menuju *E-Government*. Istilah "*Smart City*" dan "*E-Government*".

Hasil penelitian ini berkontribusi pada pemahaman sustainability, yang menjadikan *Government* lebih baik tentang memanfaatkan TIK (Teknologi Informatika Dan Komunikasi). Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat harus didukung keberlanjutan. Masyarakat akan memandang pelayanan publik semakin buruk jika teknologi yang bergerak cepat tidak diimbangi dengan birokrasi. Diharapkan dengan adanya *Smart City* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, akan dicapai dengan sistem yang menciptakan

budaya pemerintahan dan teknologi yang menggerakkan birokrasi. Relevansi rujukan adalah bagaimana pelayanan birokrasi kepada masyarakat sehingga *Government* berjalan dengan baik atau mencapai tujuan *quality of life*

Rujukan kedua ditulis oleh Warjio, Niko Bonar Halomoan Manurung, Muryanto Amin. Tahun 2020 yang berjudul Analisis Implementasi *Government* Menuju Asahan *Smart City*. Berdasarkan infrastruktur pusat komando, kelembagaan seperti perangkat hukum, kemampuan keuangan daerah, dan sumber daya manusia, implementasi *E-Government* di Kabupaten Asahan dapat dikatakan cukup baik, meskipun masih ada tugas yang harus diselesaikan. serta penciptaan sistem informasi untuk semua perangkat daerah yang tidak terintegrasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kelembagaan *E-Government* dan faktor penghambatnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Asahan. Melalui metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, adanya program di bidang teknologi komunikasi dan informasi yang terkoneksi dengan website resmi kabupaten. Akibat Perda Asahan 39 Tahun 2018 tentang Penerapan *E-Government* di Lingkungan Pemerintahan, website ini telah beroperasi sejak tahun 2015, Website ini didesain ulang dengan tampilan baru yang secara jelas menunjukkan peran actor atau pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Mengeluarkan program pembangunan dan mendorong tujuan implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pusat komando untuk data dan informasi, yang akan diwujudkan dalam layanan publik

dan informasi yang dipublikasikan dalam aplikasi layanan dan kegiatan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum.

Penelitian ini relevan dengan topik yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan proses kerja pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat secara luas dan mudah oleh pemerintahan kabupaten Asahan. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan bupati Asahan dalam mewujudkan implementasi *E-Government* menuju *Smart City*.

Rujukan ketiga ditulis oleh Haryo Winarso dan Yunita Arafah tahun 2020 yang berjudul Peningkatan dan Penguatan Partisipasi masyarakat dalam Konteks *Smart City*. Meskipun konsep *Smart City* telah dimanfaatkan secara luas di berbagai bidang, teknologi informasi dan komunikasi, ilmu komputer, dan teknik tetap mendominasi.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang harus diprioritaskan dalam upaya peningkatan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka *Smart City*. Pertama, akan mengkaji sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat terhadap konsep *Smart City* yang telah diimplementasikan khususnya di kota-kota di Indonesia. *community, smart people, dan smart governance* akan menjadi fokus kajian ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan Dalam konteks *Smart City*, partisipasi masyarakat merupakan kontribusi sukarela masyarakat terhadap pembangunan, peningkatan pelayanan, kesiapsiagaan bencana, dan administrasi pemerintah. Baik melalui sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) maupun tidak, fasilitas

yang disediakan pemerintah dapat mengkomunikasikan partisipasi tersebut. Pemerintah harus terus menarik masyarakat dengan berbagai cara konvensional dan tradisional, dan kemudahan ICT (*Information and Communication Technology*) bukan satu-satunya cara yang didorong untuk menyampaikan aspirasi dan kontribusi. meningkatkan partisipasi *Smart City Smart People* , Komunitas Cerdas, dan komponen Tata Kelola Cerdas. Meskipun kegiatan partisipasi bebas dan tidak terbatas, orang pintar atau penduduk kota pintar adalah objek penting di dalamnya. Warga harus selalu merasa dibutuhkan. Namun masyarakat harus mendukung peran dan kualitas partisipasi yang diberikan karena akan berdampak signifikan terhadap hasil pembangunan di masa mendatang.

Penelitian ini relevan dengan topic yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran tingkat partisipasi *Smart City* yang menargetkan masyarakat sebagai partisipasi perubahan sebuah Kota menjadi *Smart City* meskipun kegiatan partisipasi adalah kegiatan yang bebas dan dan tidak terkait.

Rujukan keempat ditulis oleh Ikhwan, M., & Sutriadi, R tahun 2018 yang berjudul Adaptasi pengembangan komponen ketercapaian *Smart City* (studi kasus pengukuran tingkat *Smart City* di kota palu). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan komponen *Smart City* dalam konteks pembangunan dan pengelolaan Kota. Metode penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa komponen ketercapaian *Smart City* dalam konteks pembangunan dan pengelolaan Kota di Indonesia adalah Smart People, Smart

Governance, Smart Economy, Smart Environment, Smart Mobility, dan Smart Living.

Hasil dari penelitian, dalam penerapan *Smart City* ada beberapa indikator yang berpengaruh di satu Kota atau daerah terhadap kemajuan Kota. Pada proses perumusan faktor dan indikator pengukuran berdasarkan komponen *Smart City*, ditemui adanya ketidaksesuaian indikator dengan data yang ada di lapangan sehingga indikator yang dirumuskan harus disesuaikan oleh peneliti. Indikator pengukuran berubah ubah tergantung pada kondisi ketersediaan data di lapangan.

Penelitian ini relevan dengan topic yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran indicator di suatu Kota untuk menjadikan Kota *Smart City*. Penentuan komponen, faktor, dan indikator pengukuran dan penilaian *Smart City* tidak hanya diperoleh dari berbagai teori para ahli melainkan juga dari indicator yang mana tidak menetapkan standar baku tiap-tiap komponen, faktor, dan indikator *Smart City*

Rujukan kelima ditulis oleh Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. tahun 2018 yang berjudul Implementasi Kebijakan *Smart Government* Dalam Rangka Mewujudkan *Smart City* Di Kota Bandung. Implementasi *Smart City* Bandung, khususnya komponen *Smart Government*-nya terkesan mengabaikan aspek manusia dan kelembagaan yang berpihak pada kemajuan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengkaji kebijakan *Smart Government* yang digunakan untuk mewujudkan *Smart City* di Bandung. Implementasi kebijakan adalah berpedoman pada teori Grindle menurut peneliti. Metode kualitatif deskriptif digunakan peneliti. Peneliti mengumpulkan dokumen

terkait implementasi kebijakan *Smart Government* dalam rangka mewujudkan *Smart City*, melakukan observasi dengan metode partisipasi sebagai pengamat, dan melakukan wawancara dengan 37 orang informan untuk mengumpulkan data.

Hasil menunjukkan bahwa, (1) Kajian menunjukkan bahwa kelompok sasaran diuntungkan dengan implementasi kebijakan *Smart Government* dalam rangka mewujudkan *Smart City* di Kota Bandung secara keseluruhan. Sementara isi kebijakan menunjukkan kondisi yang menguntungkan, konteks implementasi menunjukkan kondisi yang kurang menguntungkan. .Dalam studi ini, hasil lebih dipengaruhi oleh isi faktor kebijakan daripada konteks faktor implementasi.

Relevansi rujukan adalah bagaimana mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan *target groups* (kelompok sasaran). *Context of implementation* (konteks implementasi) *Content of policy* (isi kebijakan) *Smart City*, yang dimana rujukan ini menjelaskan bahwasanya sasaran *Smart Government* seperti masyarakat sangat merespon kebijakan ini sedangkan isi kebijakan kurang yang dimana rujukan ini relapan karna bahwasanya kebijakan lebih dipahami ketimbang factor-faktor.

Rujukan keenam ditulis oleh Gustomy, R. tahun 2018 yang berjudul Menguji Sistem *E-Government* Kota Malang Menuju *Smart City*. Pendapat sejumlah ahli yang mendefinisikan *Smart City* sebagai konsep pengelolaan kota terpadu yang memanfaatkan kemajuan teknologi mengacu pada kesiapan Kota Malang dalam mengimplementasikan *Smart City*. Malang telah merencanakan untuk membangun *Smart City* sejak tahun 2016 dengan memulai membangun pusat komando yang diberi nama NCC (*Ngalam Command Center*). Pengembangan kota pintar di

Malang adalah sebuah kebutuhan mengingat Kota Malang saat ini menghadapi berbagai persoalan metropolitan, seperti kemacetan, persoalan ekologi, pengemasan, penyediaan air bersih, keamanan, dan lain sebagainya. Persiapan *Smart City* salah satu alat terpenting adalah keberadaan *E-Government* yang baik untuk menopang pembangunan kota Pintar.

Maka Peneliti dalam penelitian ini mempertanyakan kesiapan *E-Government* Kota Malang, untuk kota Pintar. Dengan menggunakan konsep panduan kesiapan Kota pintar maka penelitian ini mencoba melihat kota pintar kesiapan dari dua sisi, yaitu dari sisi pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama. Pertama, Pemerintah Kota Malang mencapai 58,3% ready to *Smart City*. Selagi masyarakat Kota Malang baru 50% siap *Smart City*.

Relavansi rujukan adalah bagaimana kesiapan *Governmentd* alam menjalankan Kota pintar yang dimana rujukan ini mejelasakna kesiapan kotanya untuk menuju kota pintar, rujukan ini relavan karna menjelaskan kesiapan dari sisi pemerintah yang terlihat siap namun dari masyarakat yang masih kurang siap.

Rujukan ketujuh ditulis oleh Napitupulu, Darmawan tahun 2015 yang berjudul Kajian Faktor Sukses Implementasi *E-Government*, Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. Sejak tahun 2008, Kota Bogor telah mengimplementasikan inisiatif *E-Government* dan telah menerima berbagai penghargaan atas upaya tersebut. Sebagai hasilnya, dalam penerapan *E-Government*, Kota Bogor dapat menjadi contoh untuk wilayah tersebut, studi ini menggunakan survei berbasis

kuesioner yang mencakup daftar faktor keberhasilan yang berasal dari penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian 16 orang yang bekerja di Kantor Kominfo di Kota Bogor, terutama mereka yang terlibat dalam penciptaan sistem *E-Government*. Berpartisipasi dalam survei. Hanya 50 dari 55 faktor keberhasilan yang ditanya tentang tingkat kesepakatan mereka yang memenuhi kriteria uji, menurut temuan untuk memastikan keberhasilan implementasi *E-Government*, daerah lain pemerintah harus memprioritaskan dan fokus pada 50 faktor keberhasilan.

Penelitian ini relevan dengan topic yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran faktor perjalanan *E-Government* di Kota Bogor, meskipun bogor telah meraih keberhasilan tetapi kesalahan atau kelemahan tak luput dari sistem *E-Government*

Rujukan kedelapan ditulis oleh Utomo, C. E. W., & Hariadi, M tahun 2017 yang berjudul Strategi Pembangunan *Smart City* dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. Masyarakat kini lebih mudah mengakses informasi berkat teknologi melalui program bernama *Smart City*, masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat dengan cepat mengakses berbagai informasi seputar Kota melalui sebuah aplikasi. *Smart City* telah diterapkan di sejumlah kota sekitar dunia dan telah terbukti mampu menyelesaikan sejumlah masalah dengan cepat. Pemerintah juga dapat memanfaatkan informasi ini untuk meningkatkan kehidupan dan memberikan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban.

Artikel ini ditulis untuk memberikan gambaran tentang *Smart City* konsep dan penerapannya, oleh karena itu, penerapan strategi penerapan *Smart City* yang

tepat dan sesuai dengan kondisi kota sangat diperlukan. Namun demikian, masyarakat perkotaan tentu saja menghadapi sejumlah kesulitan yang harus diselesaikan agar *Smart City* dapat berjalan dengan baik dan pembangunan kota berjalan lancar.

Relevansi rujukan adalah bagaimana konsep *Smart City* yang tepat dan sesuai dengan konsep Kota yang memanfaatkan perkembangan melalui teknologi digital dan aplikasi, dan web resmi kota

Rujukan kesembilan ditulis oleh Nina Kurnia Hikmawati dan Moch El Bahar Conoras tahun 2018 yang berjudul *Smart City* Peluang Dan Tantangan Untuk Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Penerapan *Smart City* bertujuan untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan terkendali yang membuat perjalanan penduduk menjadi, lebih mudah dan kompetitif dari segi ekonomi, masyarakat, dan teknologi. Konsep *Smart City*, kesulitan, dan implementasinya di Papua menjadi pokok kajian ini. Penulisan ini menggunakan tinjauan literatur sebagai pendekatannya. Partisipasi multi pihak, orang pintar papua *Smart City* hanya dapat diwujudkan melalui kemitraan, berkesinambungan, renstra terpadu, dan pemerataan pendidikan. Implementasi *Smart City*.

Berdasarkan temuan studi ini, diperlukan institusi yang mengelola IT, informasi, dan sumber daya manusia untuk pengelolaan ekosistem Papua berbasis digital, dan diperlukan roadmap sebagai pedoman percepatan kegiatan pengembangan ekosistem Papua berbasis digital, sistem biologi Papua berbasis komputerisasi.

Penelitian ini relevan dengan topic yang sedang diteliti, dengan adanya rujukan ini peneliti mengetahui bagaimana gambaran konsep *Smart City* dan bagaimana tantangan serta implementasi di Papua. Melalui rujukan ini juga dapat mengetahui bagaimana konsep *Smart City* dalam konsep *smart living* yang dijalankan di Papua,

Rujukan kesepuluh ditulis oleh Agus Setiawan tahun 2019 yang berjudul Evaluasi implementasi kebijakan Semarang *Smart City* di kota Semarang, yang dimaksud dengan "kota pintar" adalah tata kelola kota yang menggabungkan fisik dan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan dengan cara yang mudah, efektif, dan efisien. Kebijakan Kota Cerdas telah diterapkan oleh pemerintah dan kota di Indonesia sebagai cara untuk mengatur pemerintahan yang sejalan dengan zaman dan teknologi. Sejak tahun 2013, kebijakan *Smart City* telah diimplementasikan di Kota Semarang, salah satu kotanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan yang mana yang mempengaruhi implementasi kebijakan Semarang *Smart City* dan bagaimana implementasinya.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan Semarang *Smart City* belum diimplementasikan sesuai dengan Master Plan Semarang *Smart City*. Dari segi kepatuhan implementor, tidak sepenuhnya sesuai dengan Masterplan Semarang *Smart City* saat mengimplementasikan kebijakan. Menurut Edward Teori III, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi semuanya berdampak pada implementasi. Korespondensi merupakan factor penghambat dalam pelaksanaan strategi Semarang Cerdik Kota, dengan alasan praktisi dalam menyelesaikan surat menyurat tidak ideal. Sementara itu, motor penggerak kebijakan

Semarang *Smart City* adalah sumber daya. Disposisi, dan struktur birokrasi yang semuanya berjalan dengan baik.

Relevansi rujukan adalah bagaimana kebijakan Semarang *Smart City* dan faktor apa saja yang mempengaruhi penghambat implementasi kebijakan Semarang *Smart City*, yang dimana implementasi ini tidak sepenuhnya berjalan dengan apa yang diharapkan Semarang *Smart City* berjalan sesuai Master Plannya.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas pelaksanaan *Smart City* di suatu daerah (Warjio, Niko Bonar Halomoan Manurung, Muryanto Amin (2020) Gustomy, R. (2018) Napitupulu, Darmawan (2015). Dan beberapa peneliti mengkaji target partisipasi *Smart City* (Haryo Winarso dan Yunita Arafah (2020) Ikhwan, M., & Sutriadi, R tahun (2018) Rahmadanita, A, Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Dan beberapa mengkaji konsep *Smart City* (Utomo, C. E. W., & Hariadi, M (2017) Nina Kurnia Hikmawati dan Moch El Bahar Conoras (2018). Lalu mengkaji pelayanan (Arjita Utama Andri (2017). Dan kebijakan (Agus Setyawan (2019).

Dalam kajian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada, yang lebih banyak melakukan kajian hanya pada pelaksana saja, ataupun pada *Smart City* melalui gambaran secara keseluruhan. Dan belum ada peneliti temukan peneliti yang membahas secara fokus dan mendalam pada fenomena pengembangan *Government* serta bagaimana fokus mewujudkan *Smart City* melalui aplikasi SiBadra terutama di Kota Bogor.

Secara akademis, hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian ilmu administrasi Negara khususnya implementasi kebijakan dan *Electronic Governmant*.

#### 1.4.2 Signifikansi Praktis

Dari penelitian yang dibuat, maka peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis

Kajian ini diharapkan dapat menambahkan pemahaman mendalam peneliti terkait dengan Implementasi pengembangan *E-Government* dalam mewujudkan *Smart CItY* di Kota Bogor

2. Manfaat bagi pemerintah

Dilakukan kajian ini diharapkan dapat menjadi saran, rekomendasi, masukan, bahan pertimbangan, evaluasi bagi pemerintah Kota Bogor dan juga unit pengelolaan Bogor *Smart CItY* dalam pengimplemntasian program *Smart CItY*, agar inovasi yang dilakukan sesuai dengan permasalahan di lapangan dan kebutuhan masyarakat.

3. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, motivasi, dorongan bagi masyarakat agar lebih peka terhadap lingkungannya melalui berpartisipasi dalam program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dengan masyarakat berpartisipasi dalam implementasi konsep *Smart CItY* diharapkan program yang dijalankan sesuai dengan permasalahan di masyarakat. Dengan kajian ini pula masyarakat dapat memberikan

gambaran yang luas kepada masyarakat bagaimana berpartisipasi dalam implementasi *Smart City* Kota Bogor melalui *E-Government*.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan proposal penelitian mengenai implelementasi pengembangan Implementasi *E-governmet Smart City* melalui aplikasi SiBadra di Kota Bogor, penelitian ini membuat sistematika pembahasan, dimana nantinya akan memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan, Topik penelitian yang diangkat akan dipaparkan pada bab pertama. Gambaran tentang alasan dilakukannya penelitian ini akan dipaparkan pada bab ini. Ini akan mencakup sistematika penulisan, latar belakang masalah, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian baik signifikansi akademis maupun praktis. Peneliti berbicara tentang pentingnya penelitian akademik dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini peneliti memaparkan kerangka pemikiran dan asumsi penelitian, dan kerangka teori pada bab ini menjelaskan pembahasan teori mengenai pengembangan *Government* dalam mewujudkan *Smart City*.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah, seperti paradigma penelitian; metode penelitian; desain penelitian; sumber dan teknik perolehan data;

teknik analisis data; *goodness and quality criteria*, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka berisi tentang kutipan jurnal, buku, alamat website dan produk hukum yang menjadi referensi untuk penulis.

#### **LAMPIRAN**

Lampiran berisi kumpulan bukti dokumen, maupun surat serta dokumentasi saat melakukan kegiatan wawancara, pengajuan surat, dan lain-lain.